

Seminar Teknis Perlindungan Sosial Indonesia (ISPTS)

PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Robert Palacios, Bank Dunia
2-3 Oktober 2024
Jakarta, Indonesia



Supported by:



Australian Government



BAGAIMANA CARA MEMBIYAI PERLINDUNGAN SOSIAL?

BERBAGAI SUMBER TELAH MENYARANKAN

Ortiz et. al. (2017) dalam Makalah Kerja ILO menyebutkan berbagai pilihan:

- Mengalokasikan kembali pengeluaran publik;
- Meningkatkan pendapatan pajak;
- Memperluas cakupan jaminan sosial dan pendapatan iuran;
- Melobi untuk bantuan dan transfer;
- Menghilangkan aliran keuangan gelap;
- Menggunakan cadangan fiskal dan devisa;
- Mengelola utang: meminjam atau merestrukturisasi utang yang ada;
- Mengadopsi kerangka ekonomi makro yang lebih akomodatif.

OBLIGASI DAMPAK SOSIAL JUGA MERUPAKAN SUATU PILIHAN

- “SIB adalah pembayaran berdasarkan kinerja instrumen yang memberi insentif kepada investor agar mengambil risiko suatu proyek tertentu guna mencapai hasil sosial tertentu dengan imbalan potensi imbalan finansial.
- Struktur dasar SIB seperti obligasi lainnya. Penerbit meminjam dana dari investor untuk jangka waktu tertentu. Alih-alih menawarkan pengembalian tetap, SIB disusun untuk membayar kupon (dan pokok itu sendiri) yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja metrik yang telah diidentifikasi sebelumnya terhadap level dasar.
- Pembayaran kinerja ini biasanya dibiayai oleh donor, atau “pendana hasil”. Investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh uang mereka jika hasil tidak tercapai.
- Dari Akinjan Jain, 2019, Bank Dunia

CONTOH INOVATIF LAINNYA

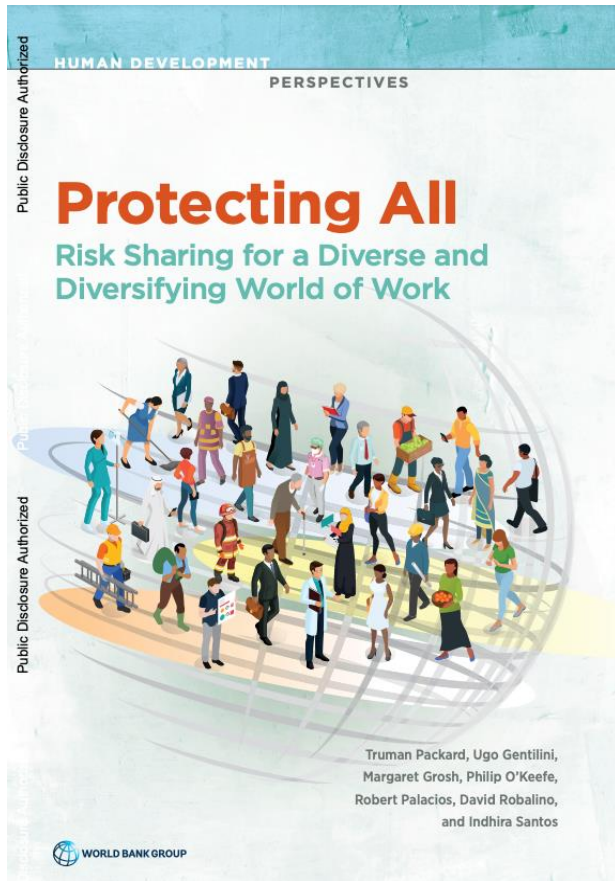
Tinjauan pengalaman internasional menemukan banyak contoh inovatif;

- Penanaman modal bagi industri ekstraktif (Bolivia, Mongolia)
- Inisiatif masyarakat sipil (Pakistan)
- Pensiun mikro (India)
- Investasi pada perusahaan sosial (Haiti)
- Realokasi pengeluaran militer (Kosta Rika, Thailand)
- Pajak yang dialokasikan untuk transaksi keuangan (Brasil), pariwisata (Ghana, Liberia, Maladewa),

Dari Bolton (2017)

KETERBATASAN

- Meskipun berguna, terutama sebagai bagian dari rencana bersama untuk memperluas SP, hampir semua 'ruang fiskal' yang diciptakan oleh opsi ini dapat digunakan untuk tujuan apa pun yang menjadi prioritas pemerintah.
- Obligasi dampak sosial mungkin pada akhirnya memiliki potensi, tetapi sejauh ini gagal untuk ditingkatkan (hanya sekitar 425 juta dalam sepuluh tahun pertama hingga 2019) dan hanya menemui sedikit keberhasilan, terutama di negara-negara berkembang.

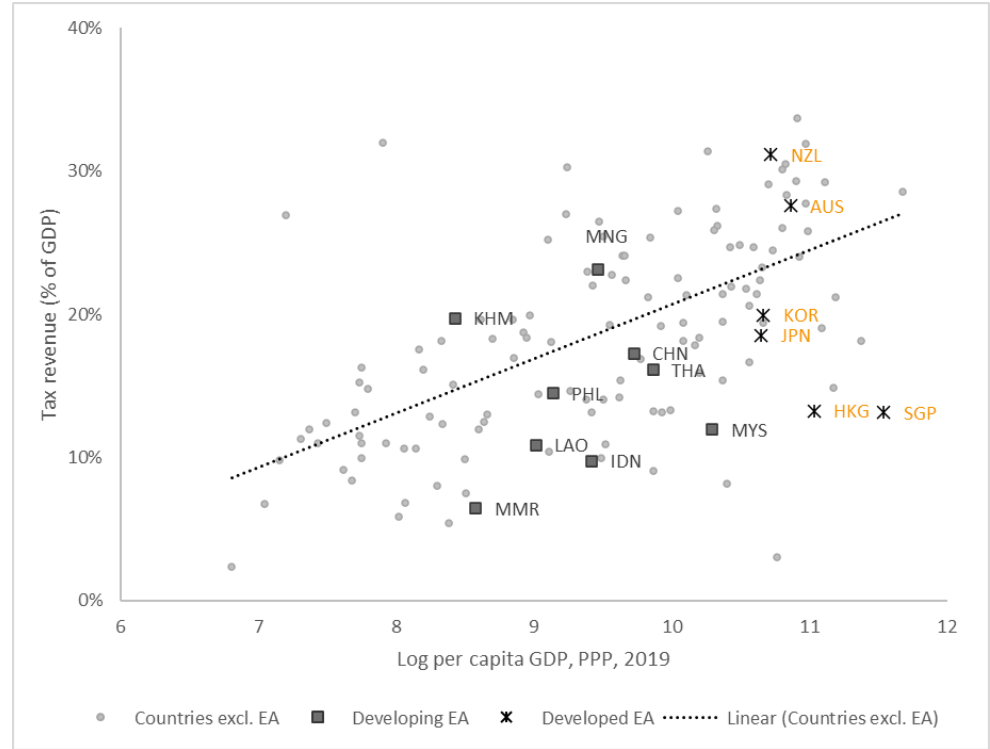


Publikasi Bank Dunia tahun 2019, “Melindungi Semua”, berfokus pada tiga area untuk menciptakan ruang fiskal –

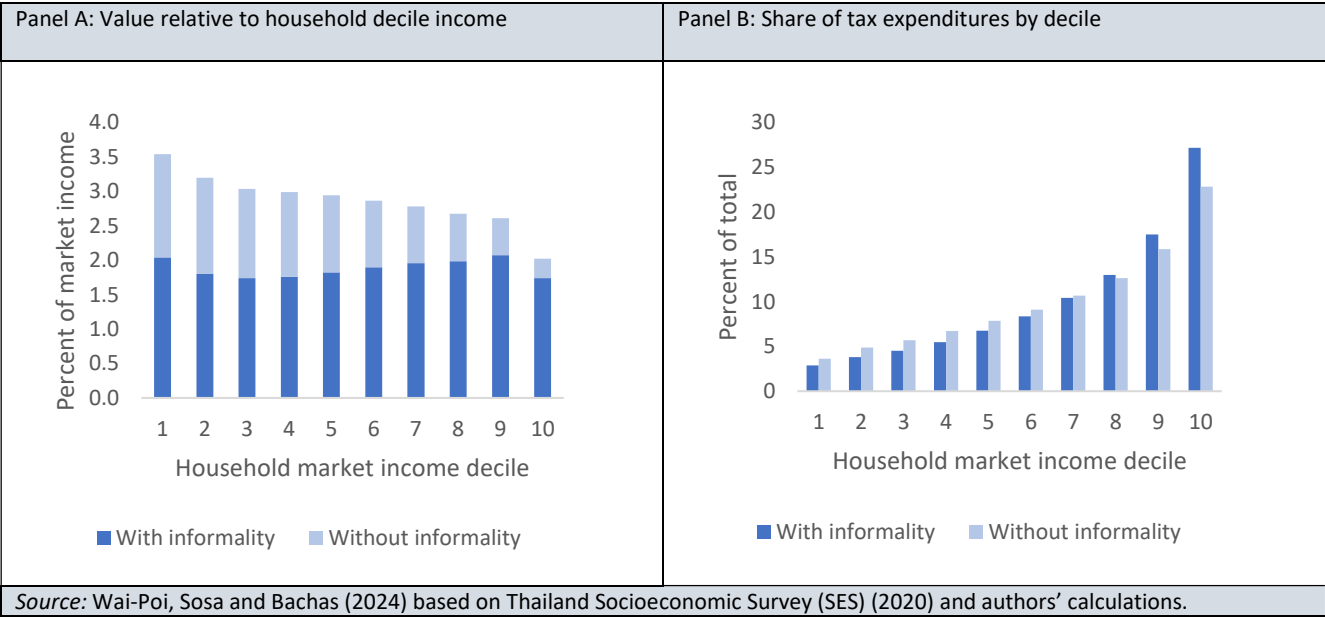
- Reformasi pembebasan PPN
- Reformasi subsidi energi
- Reformasi pensiun

Berbeda dengan sumber ruang fiskal lainnya, sumber-sumber ini memiliki kesamaan yaitu terkait langsung dengan program perlindungan sosial.

SEBAGIAN BESAR NEGARA DI ASIA TIMUR MEMILIKI KINERJA YANG BURUK DALAM PENGUMPULAN PAJAK DAN HAL INI DISEBABKAN OLEH RENDAHNYA TARIF PPN DAN BANYAKNYA PENGECCUALIAN.

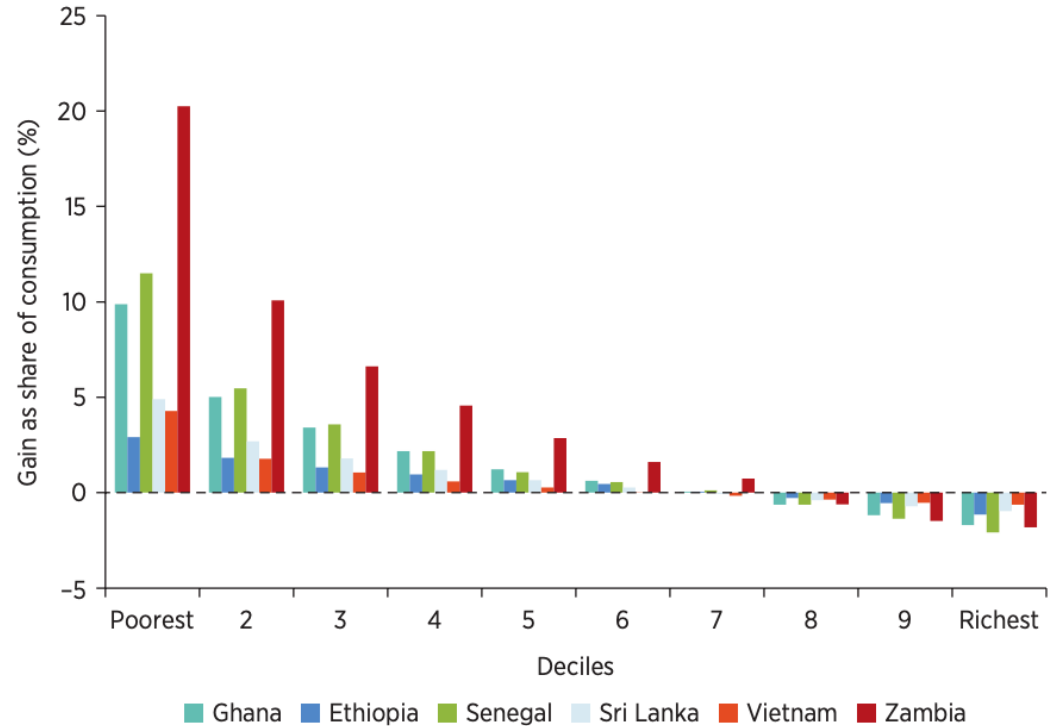


NAMUN PENGECEUALIAN CENDERUNG DIBERIKAN KEPADA ORANG-ORANG KAYA. MATI INSIDEN HILANGNYA PENDAPATAN PPN DI THAILAND.



TRANSFER TUNAI JAUH LEBIH PROGRESIF DIBANDINGKAN PENGECUALIAN PPN

Figure 5.3 Eliminating Value Added Tax Exemptions to Finance a Broad Cash Transfer Can Be a More Progressive Policy



Source: Harris et al. 2018, using GHATAx, ETHTax, and CEQ/World Bank fiscal incidence analysis.

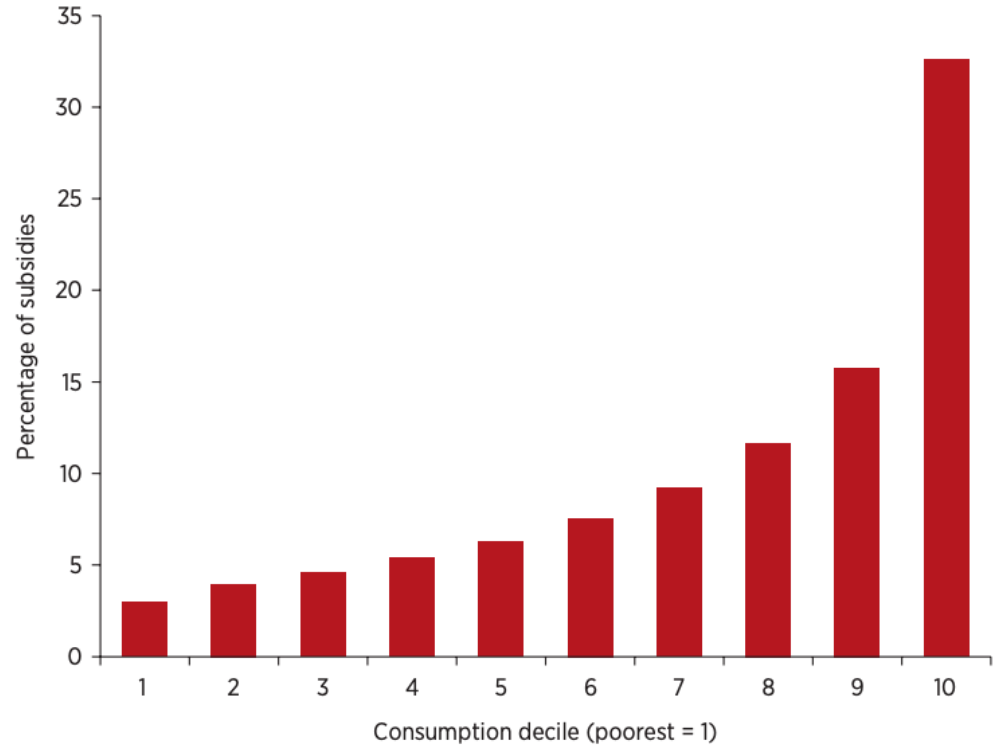
Note: This figure shows the distributional impact of implementing a uniform value added tax (VAT) and using 100 percent of revenue gains to fund a universal basic income (UBI). Population deciles are ranked by per capita consumption; the UBI is funded with the full revenue gain from implementing the VAT (which excludes only public services, financial services, and hotel lodgings) at the standard rate in each country and is distributed per capita.

HAL YANG SAMA JUGA BERLAKU UNTUK SUBSIDI ENERGI.

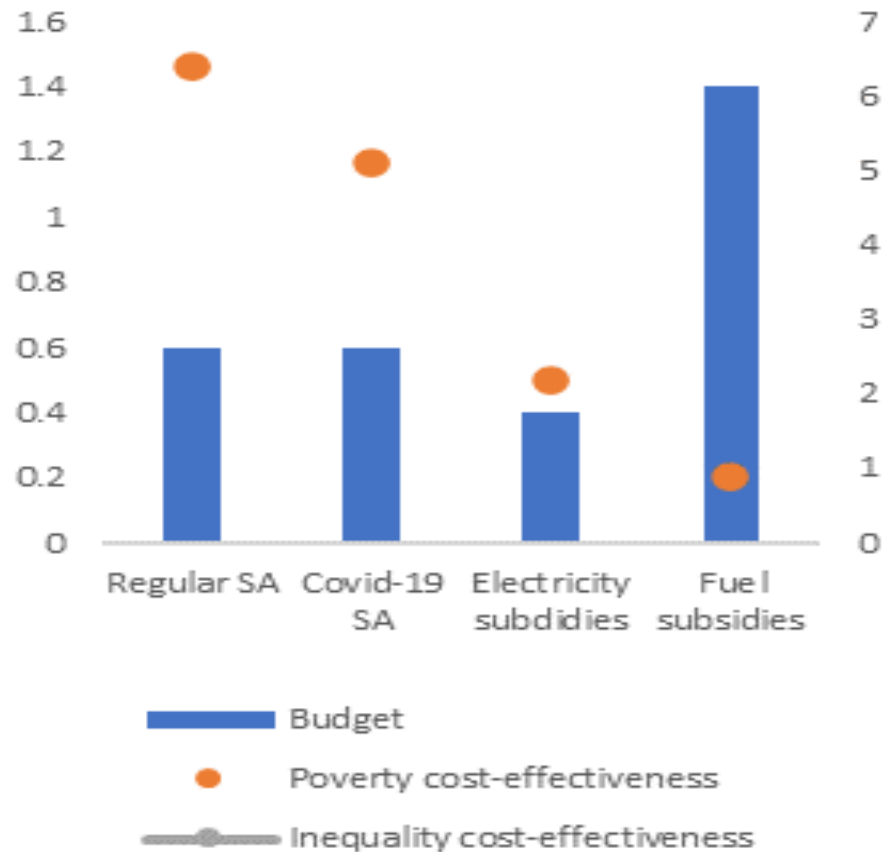
Source: Coady and Prady 2018, based on IMF staff calculations using data from India's 2011-12 National Sample Survey.

Note: This figure shows the percentage of fuel price subsidies in India received by each consumption decile (poorest = 1).

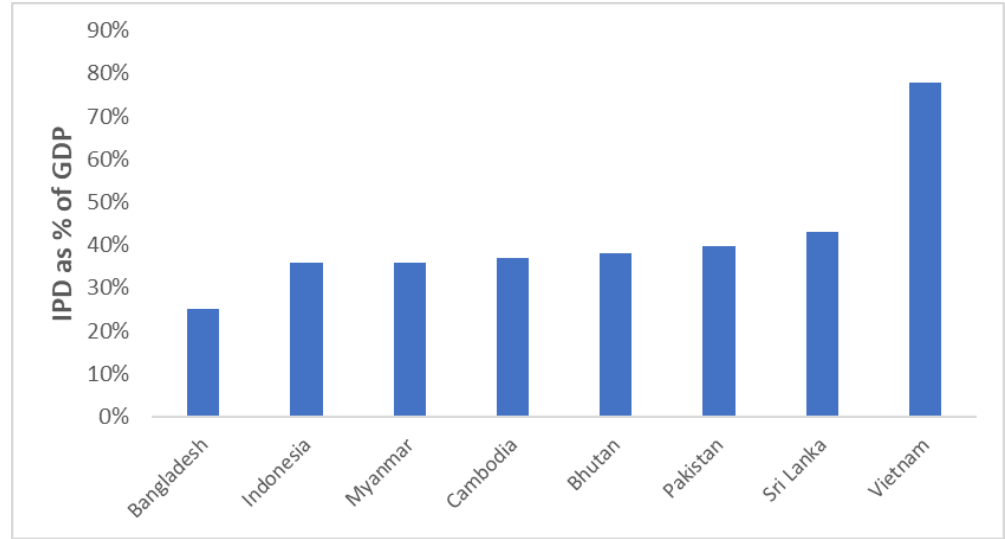
Figure 5.2 Despite Stated Objectives of Poverty Alleviation, in Many Countries the Benefits from Fuel Price Subsidies “Taper Away” toward the Bottom of the Welfare Distribution



BANTUAN TUNAI YANG DITARGETKAN JAUH LEBIH BAIK DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DIBANDINGKAN BELANJA SUBSIDI ENERGI



**JIKA REFORMASI TIDAK DILAKUKAN,
DEFISIT DANA PENSIUN AKAN
MEMBENGKAK DAN MENGGANTIKAN
PROGRAM-PROGRAM SOSIAL LAIN
YANG MENJADI SASARAN, SEPERTI
YANG TERJADI DI NEGARA-NEGARA
MAJU DENGAN SKEMA PENSIUN YANG
SUDAH MATANG.**



Jain dan Palacios (2022)

KESIMPULAN

- Terdapat banyak sumber pendanaan yang memungkinkan untuk program perlindungan sosial, namun hanya reformasi subsidi energi dan peningkatan tarif PPN atau penghapusan pengecualian yang memerlukan transfer tunai yang tepat sasaran dan sebagai kompensasi.
- Seiring dengan semakin matangnya skema pensiun di kawasan ini dan bertambahnya usia penduduk, defisit dana pensiun akan muncul dan menggantikan program pensiun lain yang lebih progresif. Untuk menghindari hal ini, reformasi harus dilakukan secara bertahap termasuk untuk mengurangi kewajiban pensiun pegawai negeri yang besar di banyak negara.
- Bersama-sama, sumber daya yang dapat dialihkan ke transfer tunai yang ditargetkan dapat dengan mudah **menggandakan atau melipatgandakan pengeluaran perlindungan sosial saat ini** di sebagian besar negara Asia Timur dengan pendapatan tersisa

TERIMA KASIH



*Kementerian PPN/
Bappenas*



WORLD BANK GROUP

SUPPORTED BY:



Australian Government